

**PENGARUH JUMLAH USAHA,
NILAI INVESTASI DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP PERMINTAAN TENAGA KERJA
PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 1997-2011**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :
ASTRI DWI WIDYASTUTI
NIM. C2B008010

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Astri Dwi Widyastuti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008010
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum terhadap permintaan tenaga kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011**
Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc, Ph.D

Semarang, 23 September 2013

Dosen Pembimbing

(Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc. Ph.D)




NIP. 196905121994032003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Astri Dwi Widyastuti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008010
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Peneliti

1. Drs. Edy Yusuf AG, MSc, Ph.D ()
2. Dra. Tri Wahyu Rejekiingsih, MSi ()
3. Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M.Si. ()

Mengetahui,

Pembantu Dekan I


Anis Chariri, SE, M.com. Ph.D. Akt

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Astri Dwi Widyastuti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011 adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 3 September 2013

Yang membuat pernyataan,

Astri Dwi Widyastuti

NIM C2B008010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH JUMLAH USAHA, NILAI INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERMINTAAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1997-2011 yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas kasih dan anugrah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc. Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan segala kemudahan, nasehat dan saran yang tulus dan mengarahkan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Ibu Nenek Woyanti SE., M.Si selaku dosen wali yang dengan tulus telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menjalani studi di Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan IESP yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Indra dan semua staff Disperindag Kota Semarang yang telah membantu dan memberi masukan penulis guna penelitian skripsi ini.
7. Bapak Ikwan dan semua staff Disnakertrans Kota Semarang yang telah membantu dan memberikan informasi dan masukan penulis guna penelitian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan dan segala pengorbanannya selama ini yang sabar dan tidak pernah putus mengiringi setiap langkah kehidupanku dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dorongan moral dan spiritual serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku mbak Wyas Eka Wulansari dan Ponakanku Aqila Izzatunnisa atas dukungan, cinta dan pengorbanan, terimakasih semangat dan doanya.
10. Buat bang Mahendra Aditya Putra terimakasih untuk semangat dan atas doanya.
11. Buat Nailul huda, Ferry Felsafa, Ardika, Hanis Khoirul, Batari Saraswati, Syamsudin, Eko Wicaksono, Narina Krinantiya, Sylvianingrum, Benedictus Riandoko, Dicky Wahyudi, Pipit Mustofa sahabat - sahabatku yang selalu siap membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teman – teman jurusan IESP regular 1 angkatan 2008 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Teman – teman Tim 1KKN 2012 riska, didik, agung, epi, nelva, uki, ditus, mas roni, fajar, mas arif, mas aziz, ilham, said, sapto, mas aziz, fani,angga, Arthur terimakasih atas dukungan dan doanya.

14. Mas nanang selaku staff BPS Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu, memberi informasi dan masukan guna penelitian skripsi ini.

15. Segenap staf dan karyawan FE UNDIP atas bantuannya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu yang juga telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Semarang, 23 September 2013

Penulis

(Astri Dwi Widyastuti)

ABSTRAK

Peran sektor industri sebagai sektor andalan dalam menyumbang perekonomian di berbagai daerah. Sektor industri sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan pembangunan di sektor industri yang akan mendorong pembangunan pada sektor lain. Pada industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam penyerapan tenaga kerja yang cenderung fluktuasi dan laju pertumbuhannya negatif di beberapa tahun . Jumlah Unit Usaha mengalami kenaikan dan penurunan, begitu pula dengan permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah. Demikian halnya dengan nilai upah minimum yang cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya namun permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa tahun. Kenaikan Upah Minimum justru mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan data time series tahun 1997-2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah unit usaha kecil dan menengah pada IKM di Provinsi Jawa Tengah, nilai investasi pada IKM di Provinsi Jawa Tengah, data tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Jawa Tengah dan upah minimum Kota (UMK). Data tersebut berupa data sekunder yang bersumber dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan *software eviews 6.0*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha kecil dan menengah pada IKM di Provinsi Jawa Tengah (UNIT) berpengaruh tidak signifikan dan pengaruh yang negatif terhadap variabel permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah. Nilai investasi pada IKM di Provinsi Jawa Tengah (INVEST) pengaruh positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah. Namun nilai Upah Minimum Kota (UMK) pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Jumlah Usaha, Nilai Investasi, Upah Minimum, Permintaan Tenaga Kerja, Sektor Industri Kecil dan Menengah

ABSTRACT

Industrial sector's role as the leading sectors in contributing to the economy in various regions . The industrial sector plays an important role in creating jobs because it is able to absorb a lot of labor and development in the industrial sector that would encourage the development of other sectors . On Small and Medium industries in Central Java province in employment is likely to fluctuations and the negative growth rate in several years . Business Unit number has increased and decreased , so did the demand for labor in the Small and Medium Industries . Similarly, the value of the minimum wage tends to increase every year , but the demand for labor in the Small and Medium Industries in Central Java Province has increased and decreased in a few years . Minimum wage hike actually lead to an increase in employment in the Small and Medium Industries.

This study uses multiple regression analysis using time series data from 1997 to 2011 year . The variables used in this study is the number of units in the small and medium enterprises in the Small and Medium Industries in District Central Java Province , the value of investments in Small and Medium Industries in District Central Java Province employed labor force data on small and medium industries in Central Java province and in the value of the minimum wage District (UMK). The data are secondary data sourced from the Department of Industry of Central Java province , BPS Central Java and Central Java Provincial Manpower Office . In this study also used multiple regression analysis using eviews 6.0 software .

The analysis showed that a variable number of small and medium in the small and medium in Central Java Province (UNIT) effect is not significant and negative effect on labor demand variables on small and medium industries in the province of Central Java. Value of investments in Small and Medium Industries in Central Java Province (INVEST) are positive and not significant effect on labor demand variables on small and medium industries in the province of Central Java. However, the value of City Minimum Wage (UMK) and not significant negative effect on labor demand variables on small and medium industries in the province of Central Java.

Keywords : Investment Value, Labor Demand, Minimum Wage, Production unit, Small and Medium Industry Sector

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011.....	4
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah IKM dan Tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah 1997-2011.....	9
Tabel 1.3 Perkembangan Nilai Investasi IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011.....	11
Tabel 1.4 Perkembangan UMR dan UMK serta Penyerapan Tenaga Kerja pada IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011.....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 4.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 serta Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011	54
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 1997-2011 (persen).....	55
Tabel 4.3 pertumbuhan perekonomian berdasarkan Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011.....	56
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.....	58
Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.....	59
Tabel 4.6 Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.....	61
Tabel 4.7 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011...	62
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Auxilliary Regression</i>	69
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Langrange-Multiplier</i>	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	70
Tabel 4.11 Hasil Regresi	72
Tabel 4.12 Hasil Determinasi.....	73

Tabel 4.13 Hasil Uji t-statistik.....

75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
Tabel 4.1 Pertumbuhan Perekonomian berdasarkan sektor Ekonomi di Jawa Tengah tahun 2009-2011.....	56
Tabel 4.2 Jumlah tenaga kerja pada IKM di Jawa Tengah tahun 1997-2011	63
Tabel 4.3 Jumlah unit pada IKM di Jawa Tengah tahun 1997-2011	65
Tabel 4.4 Nilai investasi pada IKM di Jawa Tengah tahun 1997-2011	66
Tabel 4.5 Nilai Upah Minimum di Jawa Tengah tahun 1997-2011.....	67
Tabel 4.6 Deteksi Normalitas.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Hasil Regresi Utama.....	89
Lampiran B : Hasil Deteksi.....	97

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1.4 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Pengertian IKM.....	19
2.1.2 Pengertian Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja.....	22
2.1.3 Teori Permintaan Tenaga Kerja.....	25
2.1.4 Tingkat Upah.....	27
2.1.5 Investasi.....	30
2.1.6 Unit Usaha.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33

2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	35
2.4	Hipotesis.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	39
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4	Metode Analisis Data.....	41
3.4.1	Deteksi Asumsi Klasik.....	43
3.4.2	Uji Statistik.....	47
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.1.1	Kondisi Perekonomian.....	51
4.1.2	Kondisi Demografis.....	53
4.1.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	54
4.1.4	Kondisi Mata Pencaharian.....	55
4.1.5	Perkembangan Tenaga Kerja pada IKM.....	57
4.1.6	Perkembangan Unit IKM.....	58
4.1.7	Perkembangan Nilai Investasi pada IKM.....	59
4.1.8	Perkembangan UMK.....	59
4.2	Analisis Data.....	59
4.2.1	Deteksi Asumsi Klasik.....	60
4.2.2	Uji Statistik Analisis Regresi.....	63
4.2.3	Pembahasan.....	67
BAB V	PENUTUP.....	72
5.1	Ringkasan.....	72
5.2	Saran.....	73

5.3 Keterbatasan Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Suparmoko, 1994). Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti antara lain peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro Michael, 2006).

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri yang merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan satu fungsi dari tujuan pokok

kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai pembangunan saja (Sadono Sukirno, 2000).

Proses industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang mendorong perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, proses industrialisasi didalam perekonomian sering juga diartikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi (Tulus T.H Tambunan, 2001).

Struktur ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari komposisi produk regional menurut sektor-sektor perekonomian. Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Dengan demikian proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja (Sitanggang, Ignatia Rohana dan Nachrowi, 2004).

Industrialisasi salah satu tujuannya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang
(Depnakertrans, 2004).

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut teori ekonomi mikro, mendefinisikan industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun demikian, dari sisi pembentukan pendapatan secara makro industri di artikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah (Hasibuan, 1993). Pengertian industri menurut Departemen Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, tidak termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri (Disperindag, 2012).

Tujuan yang diharapkan agar tercapai melalui pembangunan industri antara lain (Fahmi Idris, 2012) : meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri, memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian, mendukung perkembangan sektor infrastruktur, meningkatkan kemampuan teknologi. meningkatkan penyebaran industry, memperkuat struktur industry, struktur perekonomian seimbang, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan penerimaan devisa

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang

(Depnakertrans, 2004). Pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah dan kontribusi dari masing-masing sector terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
PDRB Provinsi Jawa Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 1997-2011
(Jutaan Rupiah)

Sektor	Tahun						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	23.447.766	24.295.685	25.143.605	26.124.205	26.417.424	27.725.086	27.157.595
Pertambangan dan Penggalian	987.601	1.023.315	1.059.028	1.100.330	1.190.371	1.227.651	1.295.356
Industri Pengolahan	33.152.310	34.351.166	35.550.022	36.936.472	37.164.561	39.193.652	41.347.172
Listrik, Gas, dan Air Minum	778.614	806.771	834.927	867.870	872.603	975.868	980.306
Bangunan	4.723.345	4.894.151	5.064.956	5.262.490	5.532.343	6.116.817	6.907.250
Perdagangan, Hotel dan Restoran	22.673.122	23.493.028	24.312.935	25.261.140	25.813.343	26.289.742	27.666.472
Angkutan dan Komunikasi	4.650.838	4.819.022	4.987.206	5.181.707	5.577.204	5.872.915	6.219.922
Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	3.895.926	4.036.811	4.177.695	4.340.625	4.420.388	4.524.128	4.650.861
Jasa-jasa	8.640.224	8.952.672	9.265.120	9.626.460	11.828.159	11.112.677	12.941.524
Jumlah	102.949.746	106.672.621	110.395.494	114.701.304	118.816.396	123.038.536	129.166.458

Lanjutan

Sektor	Tahun							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	28.606.237	29.924.642	31.002.199	31.862.697	33.484.068	34.949.138	34.955.957	35.421.522
Pertambangan dan Penggalian	1.330.759	1.454.230	1.678.299	1.782.886	1.851.189	1.952.866	2.091.257	2.193.964
Industri Pengolahan	43.995.611	46.105.706	48.189.134	50.870.785	53.158.962	54.137.598	61.390.101	65.528.810
Listrik, Gas, dan Air Minum	1.065.114	1.179.891	1.256.430	1.340.845	1.404.668	1.482.643	1.614.857	1.684.217
Bangunan	7.448.715	7.960.948	8.446.566	9.055.728	9.647.593	10.300.647	11.014.598	11.712.447
Perdagangan, Hotel dan Restoran	28.343.045	30.056.962	31.816.441	33.898.013	35.626.196	37.766.356	40.055.356	43.072.198
Angkutan dan Komunikasi	6.510.447	6.988.425	7.451.506	8.052.597	8.657.881	9.260.445	9.805.500	10.645.260
Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	4.826.541	5.067.665	5.399.608	5.767.341	6.218.053	6.701.533	7.038.128	7.503.725
Jasa-jasa	13.663.399	14.312.739	15.442.467	16.479.357	17.741.755	19.134.037	19.029.722	20.464.202
Jumlah	135.789.868	143.051.208	150.682.650	159.110.249	167.790.365	175.685.263	186.995.476	198.226.345

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011

Sektor industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin (*Leading Sector*). Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi atau sumbangan cukup besar terhadap PDRB di bandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu dengan rata-rata Rp 45.404.804,13 juta rupiah. Selain sektor industri pengolahan, sektor lain yang memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Nilai PDRB di tiap sektor mengalami kenaikan tiap tahunnya selama periode tahun 1997 – 2011.

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang, industri kecil dan rumahtangga, adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang (Badan Pusat Statistik, 2011).

Perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Tengah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3.887 unit perusahaan dengan 734,9 ribu orang tenaga kerja. Berarti, dari tahun sebelumnya jumlah perusahaan industri besar dan sedang turun 7,74 persen dan jumlah tenaga kerja naik 9,02 persen (Badan Pusat Statistik, 2011).

Pada tahun yang sama, nilai output industri besar dan sedang mencapai 151 trilyun rupiah, lebih tinggi 6,51 persen dari nilai output tahun 2009. Nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga

pasar naik, dari 47,43 triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi 57,46 triliun rupiah pada tahun 2010. Nilai tambah bruto terbesar dihasilkan oleh industri pengolahan tembakau yaitu senilai 14,57 trilyun rupiah dan mempekerjakan sekitar 118 ribu orang. Nilai tambah terbesar kedua dihasilkan oleh industri pengolahan tekstil dengan NTB sebesar 11,34 trilyun rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 135 ribu orang. Industri Produk dari Batu bara dan pengilangan minyak bumi merupakan sub sektor industri dengan NTB terkecil, yakni 16,58 milyar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2011).

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 644,3 ribu perusahaan industri kecil dan menengah. Pada tahun 2011 naik relatif kecil (0,04 persen) dibandingkan jumlah perusahaan tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 1,93 juta orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan industry kecil dan menengah merupakan satu hal yang penting dalam perekonomian di Jawa Tengah dan menjadi salah satu sector yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Berikut adalah perkembangan jumlah usaha dan tenaga kerja di sector IKM di Jawa Tengah.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Usaha IKM dan Tenaga Kerja pada
Industri Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1997-2011

Tahun	Industri Kecil dan Menengah		Tenaga Kerja	
	Jumlah (Unit)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Orang)	Laju Pertumbuhan (%)
1997	229.758	0,33	1.102.646	0,40
1998	229.846	0,03	1.099.677	-0,26
1999	230.001	0,06	1.101.555	0,17
2000	230.429	0,18	1.107.899	0,57
2001	319.105	38,48	1.607.919	45,13
2002	319.130	7,83	1.607.919	0
2003	319.175	0,01	1.614.919	0,43
2004	319.188	0,004	1.650.825	2,22
2005	319.419	0,07	1.639.046	-0,71
2006	319.452	0,01	1.661.635	1,37
2007	320.411	0,30	1.679.938	1,10
2008	320.590	0,05	1.700.481	1,22
2009	320.770	0,05	1.718.800	1,07
2010	319.686	-0,33	1.661.408	-3,33
2011	315.724	-1,23	1.198.584	-27,85

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997 – 2011

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah Industri Kecil dan Menengah serta Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan menengah tersebut. Pada tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah industri kecil dan menengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 1997 hingga tahun 2009 jumlah industri kecil dan menengah meningkat dari 229.758 unit usaha pada tahun 1997 menjadi 320.770 unit usaha pada tahun 2009. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun ketahun mencapai 315.724 unit usaha. Tingkat pertumbuhan unit IKM, pada tahun 2010 mengalami penurunan mencapai negatif 0,33 persen dari tahun sebelumnya.

Hal yang sama terjadi pada jumlah tenaga kerja di Industri Kecil dan Menengah. Pada tabel 1.2 terlihat bahwa dari tahun 1997 – 2009 jumlah tenaga kerja di IKM meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 1997 Jumlah Tenaga Kerja sebanyak 1.102.646 orang. Jumlah ini terus menerus meningkat hingga tahun 2009 mencapai 1.718.800 orang. Namun demikian Pada

tahun 2010 jumlah tenaga kerja di IKM mengalami penurunan sebesar 1.661.408 dan tingkat pertumbuhan mencapai angka negatif 3,33 persen. Jumlah tenaga kerja terus menurun hingga tahun 2011 mencapai 1.198.584 dan tingkat pertumbuhan mencapai angka negatif 27,85 persen dari tahun sebelumnya.

Fenomena tersebut tentunya menjadi salah satu pertanyaan besar karena pertumbuhan jumlah unit IKM dan penyerapan tenaga kerja pada sector tersebut justru mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 yang tentunya akan menjadi hal yang kontradiktif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah pada khususnya. Hal ini juga semakin kontradiktif jika dikaitkan dengan data mengenai pertumbuhan investasi yang masuk dan tercatat di Propinsi Jawa Tengah. Data mengenai perkembangan investasi pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1997 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Perkembangan Nilai Investasi
Industri Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1997 - 2011

Tahun	Investasi	
	Juta (Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1997	325.795	1,88
1998	332.441	2,03
1999	337.470	1,51
2000	362.343	7,37
2001	641.423	15,9
2002	641.403	0,03
2003	672.044	4,77
2004	685.124	1,94
2005	842.127	22,9
2006	862.512	2,42
2007	910.508	5,56
2008	921.392	1,19
2009	924.933	0,38
2010	874.114	-5,49
2011	1.170.618	33,92

Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2011

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 1997 hingga tahun 2009 nilai investasi IKM meningkat dari Rp 325.795.000,- menjadi Rp 924.933.000,- . Pada tahun 2010, nilai investasi IKM mengalami penurunan sebesar Rp 874.114.000,- dan tingkat pertumbuhan mencapai angka negatif 5,49 persen. Nilai investasi di tahun 2011 mengalami kenaikan mencapai Rp 1.170.618.000,- dengan tingkat pertumbuhan mencapai 33,92 persen. Fenomena tersebut tentunya menjadi salah satu pertanyaan besar mengenai seberapa besar peran investasi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sector IKM tersebut.

Beberapa kajian teoritis mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya. Pengembangan industri tersebut akan menyebabkan kapasitas produksi meningkat sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Selain investasi swasta terdapat investasi pemerintah yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah ini berupa pengeluaran pembangunan pemerintah dan alokasi anggaran pembangunan sektoral merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah, mungkin juga bagian dari permintaan agregat sehingga timbulnya permintaan yang berasal dari APBD di Provinsi Jawa Tengah akan berdampak positif terhadap tambahan output. Tambahan output ini akan menyebabkan tambahan kesempatan kerja karena banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output melalui kebijakan publik dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran. Melalui pengeluaran pembangunan pemerintah diharapkan mampu mempengaruhi besarnya kesempatan kerja dalam perekonomian (Hendra Esmara, 1999). Secara teoritis, semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja (Suparmoko, 1994).

Selain investasi, faktor yang seringkali menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan adalah yang berkaitan dengan upah. Menurut Payaman J. Simanjuntak (2002) permintaan tenaga kerja memiliki hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan besarnya upah minimum menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kemampuan dari masing-masing usaha IKM. Secara praktis tenaga kerja berharap akan mendapatkan tingkat upah yang lebih besar sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Namun sebaliknya jika pengusaha memberikan upah yang tinggi maka operasional dan biaya produksi akan semakin besar sehingga tingkat keuntungan akan semakin rendah. Dengan demikian jika tuntutan upah semakin tinggi maka untuk menjaga biaya operasional dan biaya produksi tetap sama maka kemungkinan besar pengusaha akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja (Payaman J. Simanjuntak, 2002).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu juga dikaitkan dengan hukum permintaan. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Sony Sumarsono, 2003). Hal ini berkaitan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Semakin tinggi upah atau gaji yang telah diberikan, maka akan mengakibatkan semakin sedikitnya permintaan tenaga kerja, begitu sebaliknya dengan hukum permintaan.

Sebagai gambaran perkembangan Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1997 – 2011 dapat di lihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Perkembangan UMR dan UMK pada IKM
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997 – 2011

Tahun	Upah Minimum	
	Jumlah (Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1997	113.000*	-
1998	130.000*	15,04
1999	153.000*	17,6
2000	185.000*	20,09
2001	245.000**	32,43
2002	314.500**	28,36
2003	342.500**	8,90
2004	365.000**	6,65
2005	390.000**	6,84
2006	450.000**	15,38
2007	500.000**	11,11
2008	547.000**	9,4
2009	575.000**	0,05
2010	660.000**	14,78
2011	717.000**	8,63

Sumber:

Dalam Angka BPS Tahun 1997-2011

Keterangan: (*) : Menggunakan Upah Minimum Regional

(**) : Menggunakan Upah Minimum Kota

Provinsi Jawa Tengah

Dari Tabel 1.4 dapat di lihat bahwa nilai upah minimum selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut tak lepas dari upaya perbaikan ekonomi pekerja. selain itu kenaikan juga dikaitkan dengan perubahan kurs rupiah. Pada tahun 1997 hingga 2000, sistem upah yang digunakan masih menggunakan UMR (Upah Minimum Regional), namun semenjak diberlakukannya otonomi daerah, tiap kota diberikan kewenangan dalam merumuskan sistem upah minimum yang akan diberlakukan pada daerahnya masing-masing dan mulai tahun 2001 sistem upah sudah menggunakan sistem UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Sudarsono dkk (1998) mengatakan bahwa dengan terciptanya kesempatan kerja dan adanya peningkatan produktivitas sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah

pendapatan, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan bagi banyak penduduk. Hal tersebut mencerminkan bahwa persoalan perluasan kesempatan kerja merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu diungkapkan banyaknya tenaga kerja yang mampu terserap dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini berarti tergantung pada tersedianya kesempatan kerja yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi serta penanaman modal baik swasta maupun pemerintah. Kesempatan kerja sendiri merupakan kesediaan usaha produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan demikian mencerminkan daya serap usaha produksi tersebut. Jadi kesempatan kerja merupakan tempat untuk masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan melihat latar belakang tersebut, maka penelitian ini menekankan pada pengaruh jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1997 – 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai salah satu sektor dalam Sektor pengolahan di Provinsi Jawa Tengah, sektor industri kecil dan menengah diharapkan memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja. Tingkat permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja mempunyai arti penting bagi pembangunan karena dapat membantu mengurangi masalah pengangguran, pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian idealnya terciptanya lapangan kerja baru akan semakin banyak diperoleh jika peningkatan terhadap eksistensi IKM tersebut sebanyak tinggi. Investasi dan stimulus yang besar pada IKM diharapkan sebagai faktor yang dapat meningkatkan IKM dan penyerapan tenaga kerja akan menyertainya.

Namun demikian data observasi awal mendapatkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 meskipun Pemerintah Propinsi mencatat adanya kenaikan investasi pada sector IKM tersebut, namun jumlah unit IKM justru mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang ada di sector IKM tersebut. Tentunya data dua tahun tersebut belum biasa dijadikan kesimpulan yang bertolak belakang dengan peran dari investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga penelitian yang melibatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di sector IKM perlu dilakukan.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan penyetapan tenaga kerja adalah yang berkaitan dengan upah. Faktor ini seringkali menjadi faktor yang krusial karena juga berkaitan dengan tuntutan pekerja. Bagi pengusaha tuntutan kenaikan upah terkadang dipandang sebagai sumber penurunan pendapatan mereka sehingga seringkali pengusaha melakukan efisiensi penggunaan tenaga kerja yang dapat menjadi sumber masalah dalam penyerapan tenaga kerja. Selama data pengamatan tahun 1997 – 2011 nilai upah minimum yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya namun permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian kenaikan upah setiap tahun tersebut tidak semata-mata karena tuntutan pekerja namun juga adanya efek penyesuaian terhadap kurs.

Payaman Simanjuntak (2002) menyatakan bahwa faktor teknologi, produktivitas, kualitas tenaga kerja dan fasilitas modal adalah konstan atau dengan kata lain, faktor-faktor pengaruh yang digunakan dalam menganalisis permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah adalah faktor perubahan pada jumlah unit usaha, nilai investasi dan upah minimum.

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterangan diatas, pokok permasalahan yang berkenaan dengan permintaan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah adalah rendahnya

penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, padahal sektor industri khususnya industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah merupakan sektor yang diharapkan menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja. Dengan demikian penelitian dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum yang berlaku terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh jumlah unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah
- 2.. Mengetahui pengaruh nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum yang berlaku terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi mengenai penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah khususnya industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melaksanakan penelitian serupa maupun lanjutan di bidang ekonomi pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Tentang variabel penelitian ini dari definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait dalam masalah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak industri yang berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada IKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pengembangan Industri Kecil Menengah perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil Menengah. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan IKM ini disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Dan menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional (Propenas) menyebutkan bahwa dalam jangka menengah kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan adalah :

1. Peningkatan utilitas kapasitas produksi industri Peningkatan utilitas kapasitas produksi industri adalah kebijakan pembangunan industri yang mengacu pada pemanfaatan peluang pasar dalam dan luar negeri berdasarkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kebijakan industri diarahkan pada peningkatan utilitas kapasitas produksi, efisiensi dan daya saing industri.
2. Pengembangan usaha kecil menengah

Kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah diarahkan pada pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang antara lain mencakup :

- a. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM – Industri dagang yang menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri seperti argoindustri, kerajinan, keramik, dan gerabah.
- b. Memberikan peluang yang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UKM dalam pemulihan ekonomi nasional harus segera diimplementasikan secara nyata dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, karena industri kecil ini dapat berfungsi sebagai :

Pertama, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional; Kedua, meningkatkan peluang kesempatan kerja;

Ketiga, pemerataan pendapatan; Keempat, mengurangi perbedaan kemakmuran antar daerah; dan kelima, struktur perekonomian yang berimbang (Iryadini Lisnawati, 2010).

2.1.1 Pengertian Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri kecil adalah kegiatan yang dikerjakan di rumah – rumah penduduk, yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat diartikan juga sebagai usaha produktif diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sampingan (Tulus T.H Tambunan, 2001).

Ciri – ciri yang dapat digunakan untuk sebagai ukuran apakah usaha itu tergolong kecil adalah (Wibowo, 1994) :

1. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum.
2. Usaha yang dikelola oleh satu orang
3. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi
4. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya

Ciri– ciri pada batasan perusahaan kecil adalah :

1. Perusahaan yang memiliki modal tidak lebih dari delapan puluh juta rupiah.
2. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi atau industri atau jasa konstruksi yang memiliki modal tidak lebih dari dua ratus juta rupiah.

Seperti Usaha Kecil ini diantaranya: kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Industri ada 3 jenis yaitu primer, sekunder dan tersier. Yang pertama, industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua, industri sekunder yaitu industri yang bahan mentah yang diolah kembali. Dan yang ketiga, industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa (Godam, 2006).

Beberapa keunggulan yang dimiliki Industri kecil dibandingkan dengan industri besar, di antaranya adalah (Partomo, 2002):

1. Inovasi dengan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja
4. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan

Walaupun banyak definisi mengenai industri kecil namun industri kecil mempunyai karakteristik yang hampir sama. Karakteristik industri kecil adalah sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 1997):

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh orang perorang yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat di kotanya.
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung mengatasi pembiayaan usaha dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang dan bahkan rentenir.

3. Sebagian industri kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.

Banyak pengertian atau definisi tentang industri kecil dan menengah. Pengertian industri kecil dan menengah beserta kriterianya sangat beragam. Keseragaman ini lebih disebabkan oleh pendefinisian pihak-pihak atau lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah. Dalam prakteknya antar departemen dan badan pemerintah mempunyai kriteria sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan industri kecil dan menengah. Perbedaan tersebut terlihat misalnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Disperindag mengukur industri kecil dan menengah berdasarkan nilai investasi awal (asset), sedangkan BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik (1995) mendefinisikan Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar satu milyar rupiah atau kurang. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang atau pun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari satu milyar rupiah namun kurang dari Rp. 50 milyar.

Sementara itu menurut Disperindag, mendefinisikan industri kecil dan menengah berdasarkan nilai asetnya yaitu Industri Kecil adalah industri yang mempunyai nilai investasi perusahaan sampai dengan 200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara 200 juta sampai 5

milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan *NO 590/MPP/KEP/10/1999*.

2.1.2 Pengertian Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah (Boediono, 1992).

2.1.2.1 Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) atau *Human Resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seseorang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok dalam usia kerja tersebut disebut tenaga kerja atau *Man power*.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja atau *Labor Force* dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah (2) golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya (Payaman J. Simanjuntak, 2002).

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya dapat menghasilkan barang atau jasa atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Mulyadi Subri, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik (2003) yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari atau mengharap pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja.

Definisi mencari pekerjaan, pekerjaan adalah :

1. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan.
3. Mereka yang dibebaskan tugasnya tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Melainkan yang bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai suatu kegiatan (Payaman J.Simanjuntak, 2002) yaitu :

1. Sekolah yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah.
2. Mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah
3. Penerima pendapatan.maksudnya adalah mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi mendapatkan penghasilan. Seperti pensiunan.

2.1.2.2 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia (Tulus T.H Tambunan, 2001).

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2002) elastisitas kesempatan kerja diartikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. Elastisitas tersebut dapat dinyatakan untuk seluruh perekonomian atau untuk masing-masing sektor atau subsektor. Elastisitas kesempatan kerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E = \frac{\Delta N / N}{\Delta Y / Y} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana :

E : Elastisitas Kesempatan Kerja

ΔN : jumlah pertambahan kesempatan kerja sektor ekonomi

N : total kesempatan kerja pada sektor ekonomi

ΔY : jumlah pertambahan produksi sektor ekonomi

Y : jumlah produksi sektor ekonomi

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja berarti pula timbulnya masalah kesempatan kerja, karena kesempatan kerja yang ada penting menyangkut berbagai aspek baik ekonomi maupun non ekonomi, disamping itu usaha perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu usaha meningkatkan taraf hidup. Kesenjangan yang terjadi diantara

pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia berdampak makin terasa mendesaknya keputusan perluasan kesempatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengertian kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Yang dimaksud lapangan kerja adalah bidang kegiatan dari usaha atau pekerja atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Menurut Soedarsono (1996), pengertian besarnya Kesempatan Kerja adalah kesediaan usaha produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), termasuk semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Kesempatan kerja dapat diukur dari jumlah orang yang bekerja pada suatu saat dari suatu kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja dapat tercipta jika terjadi permintaan akan tenaga kerja di pasar kerja, dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan tenaga kerja.

2.1.3 Teori Permintaan Tenaga Kerja

2.1.3.1 Permintaan Tenaga Kerja

Pengusaha harus membuat pilihan mengenai input (pekerja dan input lainnya) serta output (jenis dan jumlah) dengan kombinasi yang tepat agar diperoleh keuntungan maksimal. Agar mencapai keuntungan maksimal pengusaha akan memilih atau menggunakan input yang akan memberikan tambahan penerimaan yang lebih besar daripada tambahan terhadap

penerimaan total biayanya. Perusahaan sering mengadakan berbagai penyesuaian untuk mengubah kombinasi input. Permintaan terhadap pekerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi pekerja dengan input lainnya yang berhubungan dengan tingkat gaji. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa perusahaan menjual output kepasar yang benar-benar kompetitif dan membeli input dipasar yang benar-benar kompetitif (Aris Ananta, 1990).

Menurut pendapat Sadono Sukirno (2003), didalam suatu perusahaan, usaha untuk menciptakan pengalokasian faktor-faktor produksi tenaga kerja yang optimal harus dilaksanakan. Disatu pihak usaha tersebut adalah penting, karena tindakan tersebut akan menghasilkan sumber daya dalam perekonomian secara efisien. Tetapi di pihak lain, usaha tersebut adalah tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan faktor produksi yang dipekerjakannya.

Permintaan tenaga kerja memiliki hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan perusahaan atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan kepuasan atau "*utility*" kepada si pembeli. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk di jual kepada konsumen. Dengan kata lain, kenaikan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi (Payaman J. Simanjuntak, 2002).

Soedarsono (1996) menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi antara lain : naik turunnya permintaan pasar dan harga barang-barang modal yaitu mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.

2.1.3.2 Fungsi Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan perusahaan akan input merupakan suatu permintaan turunan (*derived demand*) yang diperoleh dari permintaan konsumen terhadap produk perusahaan. Dengan menggunakan input perusahaan mampu menghasilkan output yang penjualannya dapat menghasilkan penerimaan bagi perusahaan. Sedangkan tenaga kerja merupakan salah satu input yang akan memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dan usaha yang telah dilakukannya (Payaman Simanjuntak, 2002).

Perusahaan dalam melakukan produksi disebabkan oleh satu dasar yaitu karena adanya permintaan akan output yang dihasilkan. Jadi permintaan akan input timbul karena adanya permintaan output. Inilah sebabnya mengapa permintaan input oleh ahli ekonomi *Alfred Marshal* disebut dengan permintaan turunan. Permintaan akan output sendiri dianggap sebagai “Permintaan Asli” karena timbul langsung dari adanya kebutuhan manusia (Boediono, 1992).

2.1.4 Tingkat Upah

Sadono Sukirno (2003), golongan Keynes baru dikemukakan oleh Lucas menjelaskan tentang ciri-ciri penawaran agregat. Golongan klasik baru yang menganggap bahwa upah nominal akan selalu mengalami perubahan dalam permintaan dan penawaran kerja. Golongan keynesan baru, upah yang secara di kontrak diantara pekerja dan majikan atau pihak perusahaan dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan kata lain, upah cenderung untuk bertahan pada tingkat yang sudah disetujui oleh perjanjian diantara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan. Berkurangnya permintaan tenaga kerja tidak akan menurunkan upah nominal dan sebaliknya bertambahnya permintaan tenaga kerja tidak akan secara cepat menaikkan upah nominal. Semasa kontrak kerja diantara tenaga

kerja dan majikan adalah upah akan tetap atau diberikan secara konstan walaupun dalam pasaran tidak terdapat keseimbangan diantara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Payaman J. Simanjuntak (2002), dalam teori klasik menyatakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sehingga tiap-tiap faktor-faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut atau dengan kata lain, tenaga kerja memperoleh upah dengan pertumbuhan hasil marginalnya.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan. Dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja.

Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Demikian pula sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Kenaikan tingkat upah yang disertai oleh penambahan tenaga kerja hanya akan terjadi bila suatu perusahaan mampu meningkatkan harga jual barang. (Payaman J. Simanjuntak, 2002).

2.1.4.1 Fungsi Upah

M. Taufik Zamrowi (2007), fungsi secara umum terdiri dari:

1. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya manusia secara efisien untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Untuk mengalokasikan secara efisien secara sumber daya manusia. Sistem pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja kearah produktif, mendorong tenaga kerja dari pekerjaan yang produktif kepekerjaan yang lebih produktif.
3. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. Pembayaran upah yang relatif tinggi adalah mendorong, memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis, dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah sesuai dengan keperluan hidupnya.
4. Mendorong stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem pengupahan diharapkan dapat merangsang, mempertahankan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.2 Pengertian Upah Minimum

Menurut Tjiptoherijanto (1990), upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarganya.

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk

memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah (Tjiptoherijanto, 1990).

Menurut Keputusan Menteri No.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Maksud dari kata tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

2.1.5 Investasi

Menurut Sadono Sukirno (2003), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi dalam perspektif makro investasi adalah tindakan dari sektor perusahaan dalam membeli barang-barang modal dan bukan dalam perspektif individu dalam membeli barang-barang modal. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Penanaman modal ini dapat dibedakan menjadi penanaman modal Badan Usaha Milik Negara, penanaman swasta dan penanaman modal pemerintah umum. Di dalam pembangunan regional, penanaman modal atau investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Dalam perekonomian makro kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan dalam permintaan agregat tersebut akan membawa peningkatan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan akan tenaga kerja untuk proses produksi, yang artinya peningkatan dalam kesempatan kerja.

Melainkan dari menurut pendapat Suparmoko (1994), investasi adalah pengeluaran untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal (Capital Stock). Persediaan modal ini diantaranya seperti peralatan, mesin-mesin, pabrik dan persediaan bahan baku yang bisa dipakai untuk proses produksi. Jadi investasi adalah pengeluaran yang untuk menambah modal.

2.1.6 Unit Usaha

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) unit usaha adalah adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti

penyerapan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja (Azis Prabowo, 1997).

2.1.7 Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen

Dalam Sub ini menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, serta berbagai teori yang bersumber dari penelitian sebelumnya.

2.1.7.1 Unit Usaha dengan Permintaan Tenaga Kerja

Menurut pendapat Azis Prabowo (1997) bahwa jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

2.1.7.2 Investasi dengan Permintaan Tenaga Kerja

Investasi adalah seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal (mesin dan peralatan) dan pembelanjaan untuk persediaan industri selama setahun (Sadono Sukirno, 2003). Nilai Investasi ini ditetapkan atas dasar nilai atau harga dan kondisi mesin serta perawatan pada saat pembelian. Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian dan untuk

meningkatkan kapasitas produksi yang lebih tinggi diperlukan pula modal manusia yang mencukupi.

2.1.7.3 Upah dengan Permintaan Tenaga Kerja

Dian NovitaAryanti (2001) mengungkapkan bahwa Upah tenaga kerja, bagi perusahaan merupakan biaya produksi sehingga dengan meningkatnya upah tenaga kerja akan mengurangi keuntungan perusahaan. Pada umumnya, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan disamping dengan cara meminimalkan biaya juga mengoptimalkan input produksi. Dengan meningkatnya upah berarti meningkatnya biaya produksi dan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. Sugiyanto (1991), menambahkan bahwa dalam jangka panjang variabel tingkat upah merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri pengolahan.

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Dyah Ratih Sulistyastuti (2004),	dinamika usaha kecil dan menengah (UKM) analisis konsentrasi regional UKM di Indonesia 1999-2001.	Variabel dependen adalah: Penyerapan Tenaga kerja Variabel Independen adalah : jumlah unit usaha dan nilai investasi	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model Linear berganda	Dalam penelitian ini bahwa jumlah unit usaha dan nilai investasi berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tri Wahyu Rejekiingsih (2004)	Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dalam Perekonomian di Provinsi Jawa tengah	Variabel dependen adalah: Penyerapan Tenaga kerja Variabel Independen adalah: jumlah unit usaha, nilai produksi	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model Regresi berganda	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk mengukur industri kecil dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Peranan tersebut meliputi: daya serap tenagakerja, kontribusinya terhadap PDRB, multiplier pendapatan serta mengatimasi hubungan antara variabel jmlh unit usaha dan nilai produksi terhadap jmlh tenaga kerja yg terserap di industri kecil
Jaka Sriyana (2010)	Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi kasus di Kabupaten Bantul	Variabel dependen adalah: permintaan Tenaga kerja Variabel Independen adalah : investasi, usaha kecil, pemasaran, UKM dan produk	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model Linear berganda	Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk mengembangkan UKM tentu saja tidak hanya dibebankan pada UKM sendiri namun harus memperoleh dukungan seluruh stake-holders. Pengembangan UKM di Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada dasarnya adalah percepatan transformasi UKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi.
Nelsen Diyan Pratama (2012)	Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil	Variabel dependen adalah: Penyerapan Tenaga kerja Variabel	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting dalam menyumbang PDRB Kabupaten Jepara dan juga dalam penyerapan

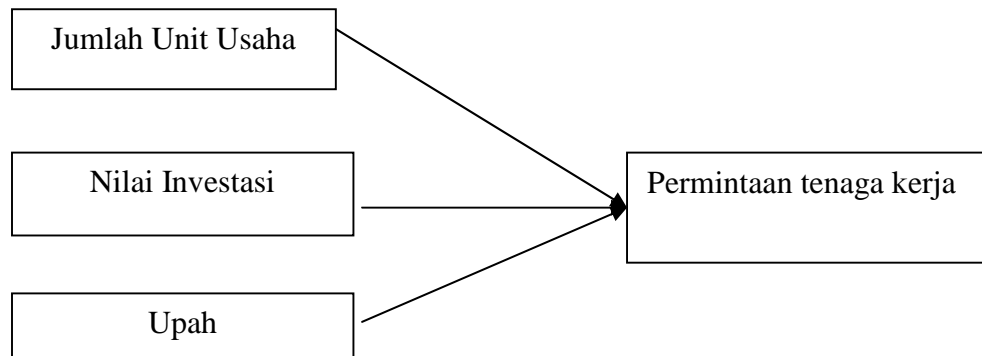
	di Kabupaten Jepara	Independen adalah : investasi, usia usaha, jenis industri	analisis : regresi linear berganda	tenaga kerja terutama pada industri kecil. Dan di dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil serta mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh.
--	---------------------	---	------------------------------------	---

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Subsektor industri di Provinsi Jawa Tengah mempunyai kecenderungan meningkat dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dalam perhitungan PDRB. Dilain pihak, peningkatan kontribusi tersebut dalam kenyataannya telah diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja yang laju pertumbuhannya positif pada beberapa tahun. Tetapi pada 2 tahun terakhir permintaan tenaga kerja cenderung mengalami penurunan, bahkan laju pertumbuhannya negatif pada 2 tahun terakhir.

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yaitu Variabel Independen antara lain jumlah unit usaha, Nilai Investasi dan Upah yang berpengaruh terhadap Permintaan Tenaga Kerja sebagai Variabel Dependen. Untuk memperjelas penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk skema berikut ini :

GAMBAR 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Model penelitian ini menggunakan model penelitian dari Nelsen Diyan Pratama (2012), Dyah Ratih Sulistyastuti (2004), Jaka Sriyana (2010) , Tri Wahyu Rejekiningsih (2004) dimana model penelitian penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha dan nilai investasi.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah.

J. Supranto (2001) mengatakan, Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga ada pengaruh positif dari jumlah unit usaha terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga ada pengaruh positif dari nilai investasi terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

3. Diduga ada pengaruh negatif dari tingkat upah terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikat. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus pada topik penelitian. sementara itu, maksud dari variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Permintaan tenaga kerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Jumlah unit usaha, Nilai investasi, dan upah.

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan Tenaga Kerja yang dimaksud merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Industri kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1997-2011 yang dinyatakan dalam satuan (orang)

2. Jumlah Unit Usaha

Jumlah Usaha khususnya pada industri kecil menengah adalah jumlah dari suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa,

terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut, diukur dalam jumlah perusahaan per tahun. Variabel ini dalam satuan unit.

3. Nilai Investasi

Nilai Investasi adalah satuan nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal (mesin dan peralatan) dan pembelanjaan untuk persediaan industri kecil dan menengah selama satu tahun di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dalam satuan (jutaan rupiah)

4. Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu Kabupaten/Kota pada suatu tahun tertentu. Upah dalam penelitian ini sebagai ukuran adalah Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah. Variabel ini dalam satuan rupiah per tahun.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, jurnal dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Data sekunder ini berbentuk data runtut waktu (time series). Data yang dipilih adalah data pada kurun waktu tahun 1997 sampai 2011 dalam bentuk tahunan.

Data-data yang dimaksud adalah data jumlah tenaga kerja Industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah, PDRB Provinsi Jawa Tengah , jumlah unit usaha industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah, Nilai Investasi industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah, serta data UMK Provinsi Jawa Tengah. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Studi Pustaka yaitu upaya untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku literatur dan data-data olahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi secara dokumen yang berasal dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah, BPS dan Disnakertrans, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah kecenderungan satu variabel, variabel dependen, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau nilai rata-rata variabel dependen atas dasar nilai tetap variabel yang dijelaskan (Damodar Gujarati, 2004). Persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\mathbf{LAB} = \mathbf{s_0} + \mathbf{\beta_1UNIT} + \mathbf{\beta_2INVEST} + \mathbf{\beta_3UPAH} + \mathbf{\mu} \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana :

β_0 : Konstanta.

LAB : Jumlah tenaga kerja pada industri kecil dan menengah. (satuan jiwa)

UNIT : Jumlah unit usaha pada industri kecil dan menengah. (satuan unit usaha)

INVEST : Nilai Investasi pada industri kecil dan menengah. (satuan juta rupiah)

UPAH : Upah pada industri kecil dan menengah.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi Berganda

μ : *disturbance error*.

Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu, untuk mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan program Eviews

3.4.1 Deteksi Asumsi Klasik

Menurut Damodar Gujarati (2004), sebuah model penelitian secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi deteksi asumsi klasik dalam regresi, yaitu meliputi deteksi normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, dan deteksi autokorelasi.

3.4.1.1 Deteksi Normalitas

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau paling tidak mendekati distribusi normal. Model regresi yang paling baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Deteksi asumsi klasik normalitas mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan μ_1 memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Damodar Gujarati, 2004). Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan Uji Jarque Bera. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan data yang berdistribusi normal.

3.4.1.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual, uji ini dilakukan dengan melakukan meregres regresi kuadrat (U^2) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 digunakan untuk menghitung X^2 , Dimana $X^2 = n * R^2$. Kriteria yang digunakan adalah apabila X^2 tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai Obs *R-Squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

3.4.1.3 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear anatar variabel independen (Wing Wahyu, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi. Maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (Imam Ghozali, 2006).

Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesame variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan

auxilliary regression untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regressions* maka didalam model tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.1.4 Deteksi Autokorelasi

Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Damodar Gujarati, 2004). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Langrange Multiplier* (LM). Dari hasil uji LM apabila nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$ lebih besar dari nilai X^2 tabel dengan *probability* $X^2 < 5\%$ menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$ lebih kecil dari nilai X^2 tabel dengan *probability* $X^2 > 5\%$ menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu Winarno, 2009).

3.4.2 Uji Statistik

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2), Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F), Uji dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t).

3.4.2.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2004). Dimana apabila nilai R^2 mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Sedangkan menurut Damodar Gujarati (2004) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R^2* yang dirumuskan :

$$AdjR^2 = 1 - (1 - R^2) \left(\frac{(n-1)}{n-k} \right) \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah sampel

3.4.2.2 Koefisien Regresi Secara Keseluruhan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Hipotesis yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus (Damodar Gujarati, 2004):

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (N-k)} \dots\dots\dots(3.5)$$

Dimana: R^2 = Koefisien determinasi

N = Jumlah observasi

k = Jumlah parameter

sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- Apabila F hitung < Ftabel, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima
- Apabila F hitung > Ftabel, maka H_1 ditolak dan H_0 ditolak

3.4.2.3 koefisien Regresi Parsial (Uji-t)

Uji statistik t untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $H_0 = b_i = 0$ variabel independen secara parsial tidak pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $H_1 = b_i < 0$ variabel independen secara parsial pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen

Dalam pengujian hipotesis dengan uji t digunakan rumus sebagai berikut:

$$T \text{ hitung} = \frac{b_i}{se(b_i)} \dots\dots\dots(3.6)$$

Dimana : b_i = koefisien regresi

$se(b_i)$ = standar eror koefisien regresi

sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- apabila $t \text{ hitung} > t \text{ statistik}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- apabila $t \text{ hitung} < t \text{ statistik}$ maka H_0 ditolak dan H_1 ditolak.